



## **Implementasi Kebijakan Program Bantuan KIP untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Pemerintah di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang**

*Willy Tri Hardianto<sup>1</sup>, Asih Widi Lestari<sup>2</sup>, Eli Susanti Debora<sup>3</sup>*

<sup>1,2,3</sup> Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, Malang, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v1i2.35>

### **CORRESPONDENCE**

E-mail: [lestariwidi263@gmail.com](mailto:lestariwidi263@gmail.com)

### **KEYWORDS**

Implementation of KIP Assistance Program Policies; To Increase Government Responsibilities; In Kalisongo Village Dau District Malang Regency.

### **ABSTRACT**

On November 3rd, 2014 President Jokowi launched his inaugural program, namely the Healthy Indonesia Card (KIS), The Smart Indonesia Card (KIP) and the Prosperous Family Card (KKS). KIP (the smart Indonesia card) is a card for poor families who want to go to school and chosen by the Government, with KIP Program, it expected the dropout rate will decrease. In the Smart Indonesia Card Program (KIP), it is stored in the card and then the government regularly provides free cash funds to children in need, including school children with Social Welfare Problems and school children from underprivileged families who have not been guaranteed. The research purposes is to describe the implementation process through the implementation of the KIP assistance program policy to increase the government responsibility and to find out the factors arising from the KIP policy program for school children who need KIP in Kalisongo Village, Dau District, Malang Regency. The success of a policy implementation will be determined from existence interrelated factors and variables with Van Metter and Van Horn model theory. The KIP program can provide the opportunities to improve educational standards for children in need through the distribution of KIP funds and can reduce public's different and diverse mindset in recognizing the KIP program.

### **PENDAHULUAN**

Pada tanggal 3 November Tahun 2014 Presiden Jokowi meluncurkan program perdananya, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan program KIP ini diharapkan angka putus sekolah bisa turun dengan drastis. pemerintah akan menyebarkan Kartu Indonesia Pintar ini pada 157.943 anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu. Selanjutnya, secara bertahap KIP akan dibagi kepada 24 juta anak usia sekolah, termasuk anak usia sekolah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang selama ini tidak dijamin. , pada tanggal 16 Mei 2018 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy Mendampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa-siswi di Kabupaten Malang Jawa Timur, Sabtu (12/5/2018), Penyerahan ini dilakukan di Lapangan Merjosari Kabupaten Malang (Kemendikbud.153).

Nugroho (2009:618) memberikan gambaran sangat jelas tentang pentingnya implementasi kebijakan publik, Namun juga ditegaskan bahwa perencanaan atau kebijakan publik itu sendiri jauh lebih penting dari pada implementasinya. Kebijakan memiliki nilai persentase 60%, sedangkan implementasi (kebijakan publik)

memiliki nilai persentase 40%. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan dari suatu program pasti melibatkan upaya yang dilakukan pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku kelompok atau instansi sasaran (Subarsono: 87). Menetapkan suatu kebijakan sebelum diimplementasikan ialah langkah awal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pencapaian seperti program yang telah dipilah sedemikian rupa, sebelum adanya penetapan, apabila disepakati bahwa cara melihat keberhasilan implementasi tidak hanya berhenti pada kepatuhan para implementer saja namun juga hasil yang dicapai setelah prosedur implementasi dijalani maka upaya untuk memahami realitas implementasi kebijakan perlu dilihat secara lebih detil dengan mengikuti proses implementasi yang dilalui para implementor dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut (Ripley 1987:134).

Dalam proses implementasi kebijakan atau program pemerintah pasti akan melibatkan perilaku birokrat dalam pemberian layanan atau jasa tertentu kepada masyarakat dan mengatur perilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran. Kebijakan tentang pendidikan di Indonesia yang berdasarkan pada pasal 31 UUD 1945 yang mengamatkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pengajaran, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Salah satu kebijakan yang sudah diimplementasikan yaitu pendidikan gratis yang bertujuan agar tidak adanya anak yang berusia pendidikan dasar dan menengah yang tidak menikmati pendidikan, sesuai dengan program pemerintah di bidang pendidikan yaitu memperluas akses pendidikan, maka pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam berbagai tingkat taraf hidup dan penggolongan sosial untuk menikmati pendidikan. Kalimat tersebut jika kaji dalam kehidupan sehari-hari hanyalah sebuah impian yang kita tidak tahu sampai kapan akan merata pada lapisan masyarakat paling bawah khususnya masyarakat paling bawah khususnya masyarakat miskin.

Muhammad Saroni (2013), Fenomena yang terjadi adalah masih ada siswa yang berasal dari keluarga mampu secara materi terdaftar sebagai penerima KIP, tapi ada juga siswa yang tergolong tidak mampu secara materi tidak terdaftar sebagai penerima dana KIP, penerimaan dananya tidak tepat pada waktunya. Padahal pemerintah mengeluarkan program ini adalah untuk siswa/masyarakat yang berasal dari keluarga miskin agar mendapat kesempatan pendidikan yang sama. Fungsi bantuan dana KIP adalah untuk membeli buku dan alat sekolah, pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll), biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa, biaya kursus/les tambahan dan keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan disekolah. Namun juga terjadi kesulitan melakukan pengawasan pengguna KIP, dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung diterima di bank, yang mengelola orang tua siswa dan pihak sekolah hanya sebagai implementor sulit mengawasi penggunaan dana tersebut. Desa Kalisongo merupakan salah satu Desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang menerima bantuan dana KIP. Di Kantor Desa Kalisongo (2022), hanyalah desa yang mendirikan 3 sekolah dasar (SD) dengan siswa siswi yang masih terbilang tidak banyak yang bersekolah, SMP dan SMA sudah masuk bagian Kota Malang, untuk masing-masing sekolah diberikan dana KIP sebesar Rp. 450.000,00 untuk SD, dana tersebut diberikan 7 pertahun (per dua semester). Karena itu penelitian ini perlu dilakukan agar dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih rinci mengenai implementasi kebijakan program bantuan KIP untuk meningkatkan tanggung jawab pemerintah di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

## METODE

Penelitian ini akan digunakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif ini menurut Moleong (2014; 6), adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan dan lain sebagainya. Berdasarkan jenis penelitian yang diambil berdasarkan penelitian kualitatif maka peneliti ingin memahami tentang implementasi kebijakan program bantuan KIP untuk meningkatkan tanggung jawab pemerintah di desa kalisongo kecamatan dau kabupaten malang seperti apa dan bagaimana saja Pemerintah dalam menangani kebijakan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang Implementasi Kebijakan Program KIP Untuk meningkatkan tanggung jawab pemerintah Di Desa Kalisongo Kec Dau Kab Malang yang merupakan suatu untuk membantu anak yang tidak mampu/miskin, dan dalam landasan akan menjadi kunci untuk membandingkan hasil wawancara dan observasi

dilapangan. oleh sebab itu, maka *Ripley* (1985) menjelaskan bahwa “keberhasilan implementasi tidak hanya berhenti pada kepatuhan para implementer saja namun juga hasil yang dicapai setelah prosedur implementasi dijalani maka upaya untuk memahami realitas implementasi kebijakan perlu dilihat secara lebih detail dengan mengikuti proses implementasi yang dilakukan para implementer dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Sehingga dalam proses implementasi kebijakan ini yang bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab pemerintah untuk masyarakat kepada anak yang membutuhkan KIP yang telah dijelaskan oleh *Ripley* (1985), minimal mencakup mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan, bagaimana hubungan sosialnya, tujuan sasaran, maupun pemahaman masyarakat mengenai KIP. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas bahwa pelaksanaan kebijakan dari pemerintah Didesa Kalisongo melalui tanggung jawab pemerintah Pendidikan sudah terlaksanakan dan hal ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dan Pendidikan menyediakan KIP untuk masyarakat yang membutuh serta memberikan kesempatan untuk bersekolah.

### **Pentingnya hasil yang baik**

- 1) Perilaku Hubungan Antar Organisasi, Didalam berbagai program, implementasi sebuah program yang memerlukan koordinasi dan dukungan dengan instansi lain maka dari itu perlu yang namanya Kerjasama dan koordinasi antar instansi untuk keberhasilan dalam sebuah program. Sehingga untuk mewujudkan keberhasilan tersebut pemerintah Pendidikan daerah dapat bekerjasama dengan pihak pemerintah desa, serta pihak sekolah untuk program KIP bagi anak-anak yang membutuhkan yang sangat membantu Pendidikan. Dari hasil penyajian data diatas maka dengan adanya implementasi kebijakan bantuan KIP untuk desa Kalisongo melalui program pemerintah Pendidikan, itu sangat membantu salah satu dalam peningkatan kualitas Pendidikan kepada sumber daya manusia melalui bantuan KIP dan menjadi kesempatan bagi masyarakat bersekolah. Oleh sebab itu hal ini termasuk dalam kategori suatu tanggung jawab pemerintah untuk membantu anak yang membutuhkan berdasarkan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Sujianto (2008) yang menyatakan bahwa ada lima variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yakni : standart dan tujuan kebijakan, sumberdaya kebijakan, aktivitas pengamatan, komunikasi antar organisasi, penguatan aktivitas, karakteristik, agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, serta politik.
- 2) Perilaku Implementor (Aparat Birokrat) Tingkat Bawah Perilaku Implementor, Merupakan kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Desa Kalisongo Kec. Dau kab. Malang dengan melalui berbagai cara. Dimana kelompok aparat birokrat ini mampu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi adanya program Kartu Indonesia Pintar dikalangan masyarakat desa yang berada di kabupaten Malang. Adapun dimensinya yaitu: (a) Kontrol Organisasi, (b) Etos Kerja, dan (c) Norma-norma profesional. Dari hasil penyajian data diatas perilaku implementor yang dibentuk supaya tetap terjalin dengan baik dan terlaksana antara pemerintah dan masyarakat dalam program KIP.
- 3) Perilaku Kelompok Sasaran Kelompok, bukan hanya pengaruh yang diberikan terhadap dampak kebijakan tetapi juga memberikan pengaruh pada kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang timbulkan tidak baik maka kinerjanya juga akan buruk. Maka menurut *Ripley* (1985:134) Perilaku kelompok sasaran meliputi respon yang positif dan negative dari masyarakat baik itu pendukung maupun tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai dengan adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat. Dan berdasarkan dari data diatas yang merupakan bentuk Kerjasama dengan pemerintah kepada masyarakat dan dapat dilihat dari checklist tentang apa yang harus dilakukan oleh para implementor dalam melakukan delivery berbagai policy output kepada kelompok sasaran. Sehingga penyajian data diatas dapat diukur bahwa keberhasilan suatu program seperti KIP kemudian diukur dari ketepatan atau kemampuan mereka dalam mengikuti berbagai peraturan yang telah dibuat sehingga dana dapat dikelola dengan benar dan juga di pergunakan dengan semestinya.

### **Pentingnya pembahasan**

Faktor adalah sesuatu yang menjadi kendala yang ada dalam proses implementasi kebijakan KIP bagi masyarakat, yang datang dari lingkungan masyarakat sekitar atau juga yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Dari observasi dan penyajian data diatas menunjukkan bahwa faktor dalam pelaksanaan implementasi kebijakan didesa Kalisongo melalui program bantuan KIP dapat disimpulkan sebagai berikut diantaranya: 1). Faktor pendukung, yang terdapat di masyarakat yaitu dari segi peningkatan dalam Pendidikan bertambah, rasa percaya diri, semangat menjadi kunci keberhasilan dari dana yang diberikan kepada anak-anak

yang membutuhkan, dengan begitu dapat menolong perekonomian yang tidak bekerja maupun yang tidak memiliki penghasilan yang cukup. 2). Faktor penghambat, yang dirasakan masyarakat yaitu dari segi memiliki tingkat sumber daya manusia yang tidak sama dengan pola pikir serta pemahaman yang beragam yang terkadang dapat menimbulkan konflik mengenai adanya Program KIP dan menjadi hambatan. Sehingga dari penyajian data diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwa Dari hasil proses yang Panjang dalam suatu program KIP yang dilakukan faktor juga menjadi salah satu tolak ukur penilaian bagi suatu pemerintah daerah atau Pendidikan untuk dapat dikatakan berhasil atau tidaknya dalam menjalankan program KIP untuk anak yang miskin.

**Tabel 1. Jumlah Anak Yang Menggunakan KIP SDN 03 Kalisongo.**

[illegible]

*Sumber: Staf Operator SDN 03 Kalisongo.*

**Tabel 2. Tamatan Sekolah Masyarakat.**

| No                  | Keterangan                       | Jumlah      | Prosentase   |
|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| 1                   | Lulusan S-1 keatas               | 522         | 6%           |
| 2                   | Lulusan SMA                      | 764         | 9%           |
| 3                   | Lulusan SMP                      | 593         | 7%           |
| 4                   | Lulusan SD                       | 1863        | 23%          |
| 5                   | Tidak tamat SD/ tidak sekolah    | 57          | 1%           |
| 6                   | Belum/Sedang Menempuh Pendidikan | 4407        | 54 %         |
| <b>Jumlah Total</b> |                                  | <b>8206</b> | <b>100 %</b> |

Sumber: RKP. Desa Kalisongo, Sistematika & Mekanisme Desa Kalisongo, Profil Desa, RPJMDes 2000-2025.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan KIP untuk anak-anak yang membutuhkan sebagai dana dalam Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan tanggung jawab pemerintah sebagai implementor kebijakan dalam menyalurkan dana program bantuan KIP bagi masyarakat di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang dapat dilihat dari perilaku antar organisasi, perilaku tingkat bawah, perilaku kelompok sasaran, bahwa pemerintah bertanggung jawab mengenai dana yang akan disalurkan, dan kerjasama antar sekolah juga terbilang cukup efektif sehingga standart pendidikan membaik dan tingkat putus sekoalh berkurang.
2. Faktor pendukung yang dirasakan masyarakat ada dalam proses implementasi kebijakan KIP didesa Kalisongo yang terlaksana serta meningkatkan sumberdaya pendidikan dan berkembang lebih maju, dengan adanya bantuan yang dapat menolong anak yang miskin untuk bersekolah dan juga berhasil terwujudnya program pemerintah daerah maupun Pendidikan yang disalurkan sebagai mana mestinya sesuai.
3. Faktor penghambatan dalam proses kebijakan KIP untuk masyarakat didesa Kalisongo masih ada kurangnya pemahaman menggunakan dan mengelolah dana yang diberi karena pemahaman yang sangat minim serta pola pikir yang berbeda dan beragam.

## REFERENSI

- <https://pauddikmaskalsel.kemdikbud.go.id/berita-158-kartu-indonesia-pintar-kip-jamin-pendidikan-berkelanjutan.html>
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 diantaranya mengamanatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moleong J, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, Pemerintah menerbitkan kartu identitas bagi penerima program perlindungan sosial.
- Prof.Dr.Sugiyono. 2015.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung.ALFABETA.
- Purwanto Agus E.PH. D.2015.*Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya DiIndonesia*. Yogyakarta. Gava Media.
- RKP.Desk Kalisongo, *Sistematika & Mekanisme Desa Kalisongo, Profil Desa, RPJMDes 2000-2025*.
- Sartika.2018. Implementasi Kebijakan KIP Di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Setyawan Dody.2017. *Pengantar Kebijakan Publik*, Malang, Indonesia, Integensia Media, CV. Cita Intrans Selaras.
- Sugiyono, 2013.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*.Bandung :Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II Pasl 3 (2012), menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- UUD 1945 pasal31 yang mengamatkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu system pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
- Wulandari Suci. 2020.Efektivitas Program KIP Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.